

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Optimilisasi peran dan fungsi DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran daerah masih belum optimal. Dari mulai tahap perencanaan, penganggaran, realisasi dan pengawasannya. Pernyataan ini bisa dibuktikan dari hasil temuan BPK yang jumlahnya masih terus naik. Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 mengungkapkan 6 (enam) temuan ketidakefektifan. Sedangkan tahun anggaran 2019 s.d 2021 ada 13 (tiga belas) temuan hasil pemeriksaan BPK Jabar di Kabupaten Karawang yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan nomor: 33B/LHP/XVIII.BDG/06.2022 tertanggal 6 Juni 2022. Untuk itu DPRD Karawang memiliki program khusus seperti temuan BPK, Aduan Masyarakat dan program triwulan yaitu rapat anggota dewan yang dilakukan per tiga bulan sekali untuk mengawasi berjalannya realisasi anggaran tersebut sesuai dengan ukuran persen yang telah di targetkan di dalam perencanaan.
2. Kendala yang dialami Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang yaitu kendala teknis. Kendala teknis yaitu kendala yang terjadi di lapangan yang tidak sesuai antara perencanaan dengan realisasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang masih harus meningkatkan pengawasan dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran daerah. Anggota DPRD Karawang hendaknya meningkatkan wawasan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia dari segi teknis maupun pengawasan seperti meningkatkan keterampilan pengetahuan tentang peraturan daerah dan meningkatkan kedisiplinan agar memaksimalkan pelaksanaan tugas fungsi pokoknya dengan baik dan tepat waktu
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus lebih aktif dalam melakukan Kerjasama dengan pihak inspektorat untuk menghindari adanya penyalahgunaan anggaran daerah, selain itu juga DPRD Karawang tetap harus berperan aktif dalam mengawasi anggaran meskipun anggaran tersebut tidak melalui kas daerah terlebih dahulu. Supaya tidak ada celah bagi oknum atau pelaku yang hendak melakukan penyimpangan anggaran

